

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Masa Persidangan	: V
Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Jenis Rapat	: Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Hari, Tanggal	: Kamis, 27 Juni 2024
Pukul	: 16.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Mendengarkan Penjelasan terkait Perkembangan Penanganan Gangguan Pusat Data Nasional
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. ... orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI2. a. Menteri Komunikasi dan Informatika R.I., Budi Arie Setiadi, S.I.P.,M.Si.;3. b. Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsu Siburian; beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 16.39 WIB dibuka dengan Rapat bersifat terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BSSN pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait perkembangan penanganan insiden di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Terkait penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang telah mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik, dan hingga saat ini belum pulih.
2. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, untuk mencegah serangan siber di masa depan terhadap PDNS, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo dan BSSN untuk mengambil langkah-langkah berikut:
 - a. **Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional** yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDNS. Satgas melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.
 - b. **Membentuk Crisis Centre Terpadu** yang berfungsi sebagai pusat bantuan (*helpdesk*) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware.
3. Komisi I DPR RI akan segera mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan Menkominfo dan Kepala BSSN untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.31 WIB.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I.

Jakarta, 27 Juni 2024
KETUA RAPAT,

BUDI ARIE SETIADI S.I.P.,M.SI

MEUTYA VIADA HAFID
A-267

KEPALA BSSN R.I

LETJEN TNI (PURN) HINSA SIBURIAN